

MAARIF Vol. 11, No. 2 – Desember 2016

ISSN : 1907-8161

MAARIF

ARUS PEMIKIRAN ISLAM DAN SOSIAL

**SETELAH "BELA ISLAM":
GERAKAN SOSIAL ISLAM,
DEMOKRATISASI, DAN
KEADILAN SOSIAL**



Penanggung Jawab	Ahmad Syafii Maarif Jeffrie Geovanie Rizal Sukma
Pemimpin Umum	Fajar Riza Ul Haq
Pemimpin Redaksi	Ahmad Imam Mujadid Rais
Wakil Pemimpin Redaksi	Muhd. Abdullah Darraz
Redaktur Tamu	Zainal Abidin Bagir
Dewan Redaksi	Ahmad Najib Burhani Ahmad-Norma Permata Clara Juwono Haedar Nashir Hilman Latief Luthfi Assyaukanie M. Amin Abdullah
Sekretaris Redaksi	M. Supriadi
Redaktur Pelaksana	Khelmy K. Pribadi, Ahmad Imam Mujadid Rais Pipit Aidul Fitriyana
Design Layout	Deni Murdiani, Harhar Muharam
Keuangan	Henny Ridhowati
Sirkulasi	Awang Basri, Pripih Utomo
Alamat Redaksi	MAARIF Institute for Culture and Humanity Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810 Telp +62-21 8379 4554 Fax +62-21 8379 5758 website : www.maarifinstitute.org email : jurnal@maarifinstitute.org mujadid.rais@gmail.com darrazophy@yahoo.com

Donasi dapat disalurkan melalui rekening :
Yayasan A. Syafii Maarif
BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara)
0114179273

Terbit Perdana Juni 2003

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas maksimal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

Pengantar Redaksi

- Setelah "Bela Islam": Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi,
dan Keadilan Sosial 4
Ahmad Imam Mujadid Rais dan Zainal Abidin Bagir

Aksi Bela Islam: Ragam Penjelasan

- Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan..... 15
Ahmad Najib Burhani
- "Aksi Bela Islam," Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia? 30
Mohammad Iqbal Ahnaf
- Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki 43
Airlangga Pribadi Kusman
- Ekonomi-Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis? 53
Rizky Alif Alvian
- Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik
dan Dilema Negara Hukum Demokratis 71
Fiqh Vredian Aulia Ali

Islam Moderat Indonesia: Terlalu Besar Untuk Gagal?

- MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang..... 87
Moch Nur Ichwan
- Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam..... 106
Mark Woodward & Amanah Nurish
- Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar 125
Abdul Gaffar Karim & Longgina Novadona Bayo
- Muhammadiyah dan Aksi Damai Bela Islam :
Rejuvenasi Politik Umat Islam? 137
Zuly Qodir
- Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia 138
Ahmad Suaedy

Sisi-sisi Lain Aksi Bela Islam

- Perempuan dan Media Dalam Aksi "Bela Islam" 159
Alimatul Qibtiyah
- Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan
Identitas Muslim Perkotaan Indonesia..... 172
Muhammad Wildan
- Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial
Pasca "Aksi Bela Islam" 2016 185
Hilman Latief

Profil Pe

Profil M

Petunju

MUHAMMADIYAH DAN AKSI DAMAI BELA ISLAM : REJUVENASI POLITIK UMAT ISLAM?

Zuly Qodir

Abstrak

Muhammadiyah menjadi salah satu tolak ukur kondisi Islam Indonesia, selain Nahdlatul Ulama. Dua organisasi Islam mainstream ini diharapkan oleh banyak pihak menjadi warna karakteristik Islam Moderat Indonesia, yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Pada kasus Aksi Bela Islam 411 dan 212 tahun 2016 yang lalu, dua organisasi Islam ini secara resmi tidak mendukung berlangsungnya dua aksi tersebut. Tetapi di lapangan, massa dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia banyak yang terlibat, baik secara langsung datang ke arena aksi di Ibu Kota Jakarta maupun menjadi simpatisan berbagai aksi di daerah seluruh Indonesia. Sebagian lagi tidak hadir di Jakarta atau aksi di daerah, tetapi menjadi pengamat sekaligus peneliti tentang berlangsungnya aksi damai bela Islam tersebut. Publik pun kemudian mempertanyakan sikap politik Muhammadiyah dan NU dalam kaitannya dengan dua Aksi Damai Bela Islam di Jakarta. Mengapa Muhammadiyah dan NU tidak hadir di tengah massa Aksi Bela Islam, sementara banyak ormas Islam lainnya hadir bahkan menjadi aktor utama di sana. FPI, GNPF, MUI dan beberapa ormas Islam di Jakarta, Jawa Barat, bahkan dari daerah seperti Lampung, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Banjarmasin pun hadir di Jakarta. Selain Rizieq Shihab, Ustadz Aa Gym, Ustadz Bahtiar Nasir, dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi NW seakan menjadi magnet politik umat Islam ketika aksi berlangsung. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang seakan-akan menjadi rujukan umat Islam di seluruh Indonesia.

Kajian ini mengkhususkan pada sikap politik Muhammadiyah pada Aksi Damai 411 dan 212. Kajian ini menemukan ada dualisme sikap politik. Dari kajian yang dilakukan memperlihatkan jika Muhammadiyah sebenarnya berada di "seberang jalan" dari Aksi Damai yang berjalan di Jakarta, sekalipun

tidak disuruh atau dilarang, tetapi warga Muhammadiyah ikut dan sebagian mendukung dengan "bendera lain" yang menjadi atribut warga Muhammadiyah, seperti Laskar Fastabiqul Khairat Jogjakarta, Laskar Sancang Jawa Barat dan Ambulance PKU Muhammadiyah DKI. Kajian ini mendasarkan pada kajian lapangan dengan wawancara pada beberapa elit Muhammadiyah di daerah, diskusi tidak terstruktur (wawancara dan focus group discussion) serta kajian literatur selama bulan Desember 2016 dan Januari 2017. Pendekatan dalam kajian ini adalah sosiologi politik yang bertujuan mendeskripsikan serta analisis antar kekuatan dengan memperhatikan situasi politik nasional yang berlangsung sepanjang Aksi Damai dilaksanakan.

Kata kunci : aktor, Muhammadiyah, kepentingan politik, umat Islam

Pendahuluan

Di akhir tahun 2016, gonjang-ganjing politik nasional terjadi ketika di Jakarta terjadi tiga kali aksi yang dilakukan oleh umat Islam terkait dengan Pilkada Jakarta dan Ahok sebagai aktor utamanya. Aksi pertama pada Oktober 2016 di Balai Kota tidak menyedot perhatian publik secara luas. Tetapi Aksi kedua dan ketiga dengan tagline AKSI BELA ISLAM yang kemudian dikenal luas dengan sebutan Aksi Bela Islam 411 dan Aksi Bela Islam 212 menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik Indonesia bahkan luar negeri. Banyak orang pun kemudian menyebutnya sebagai gerakan *people power* umat Islam Indonesia, konon ada yang mengklaim aksi itu dihadiri oleh kurang lebih 5-7 juta manusia dengan berpakaian putih-putih. Sebagian lagi menyebut sebagai gerakan *Islam populis*—merujuk pada istilah Populisme Islam yang dikemukakan oleh Vedi R Hadiz, ketika membaca gerakan demonstrasi di Timur Tengah dan Indonesia beberapa waktu sebelumnya—sebab melibatkan massa arus bawah yang sebenarnya sebagian besar adalah awam politik.¹

Aksi Bela Islam menjadi besar tentu bukan karena penyebab tunggal. Terdapat banyak penyebab di sana, baik politik, ekonomi, hukum, kewargaan dan kultural. Inilah yang kemudian memunculkan banyak aktor dan peristiwa di antara satu dengan lainnya saling berkelit berkelindan. Tidak ada yang tunggal di sana. Secara nasional dan lokal kondisi politik kita terus berubah dan tensinya sangat tinggi, terutama menjelang Pilkada serentak di Indonesia. Kita melihat, misalnya, sebagian dari peserta aksi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih terbilang lemah dalam hal penegakan hukum dan ekonomi rakyat. Oleh karenanya, dalam aksi di Jakarta, dua isu ini menjadi perhatian para peserta aksi ketika Orasi, terutama pada Aksi Damai yang

¹ Vedi R Hadiz, *Populisme Islam in Indonesia and the Middle East*, ISEAS, Singapore, 2015

perdana 411 2016. Aksi Bela Islam I dan II menjadi perhatian publik bukan saja karena massa yang datang, tetapi aktor yang muncul merupakan orang yang sangat variatif bahkan antagonistik.

Terkait dengan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi, tampak dari dua fakta yang terjadi sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini, yakni kinerja menteri-menteri kabinet yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan kurang (bahkan) tidak independennya Presiden Jokowi dari tekanan partai-partai politik yang mendukungnya. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang lemah ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK merosot. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ), sebanyak 51,3 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.² Sebanyak 78,9 persen publik tidak puas dengan penanganan bencana asap yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.³

Sedangkan hasil survei yang dilaksanakan oleh lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 51,26 persen masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK, dengan alokasi persentase 71,79 persen ketidakpuasan terhadap bidang politik, hukum, kesehatan, keamanan, dan pendidikan.⁴ Selaras dengan hasil survei Lembaga Survei Jakarta (LSJ) bahwa angka ketidakpuasan masyarakat lebih dari 50 persen. Dengan dasar tersebut, maka, dapat dikatakan bahwa angka ketidakpuasan tersebut cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan survei pada enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kualitas kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun dari 44 persen menjadi 42,95 persen.⁵

Fakta di atas menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Terlebih bidang politik, hukum, kesehatan, keamanan, dan pendidikan merupakan sektor-sektor yang fundamental di dalam penyelenggaraan negara. Kualitas kinerja kepala negara tidak dapat dipisahkan dari kualitas kabinetnya. Kabinet Presiden

² Kabar Pergerakan.com. *Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK*. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

³ Pernyataan Rendi Kumia (peneliti utama LSJ), di Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2016 dalam Kabar Pergerakan.com. *Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK*. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

⁴ Kabar Pergerakan.com. *Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK*. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

⁵ Pernyataan Hanta Yudha (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia) dalam Kabar Pergerakan.com. *Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK*. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.

Jokowi dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja. Kualitas kinerja para menteri di dalam kabinet turut menentukan kredibilitas Kepala Negara. Faktanya, berdasarkan hasil survei oleh lembaga Indo Barometer yang menunjukkan angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja menteri di dalam Kabinet Kerja secara umum mencapai 46,7 persen.⁶ Angka ini lebih tinggi dari jumlah masyarakat yang puas terhadap kinerja para menteri di dalam kabinet.

Demikian pula mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tampak tidak kuat dan mudah dikendalikan oleh partai-partai pendukungnya. Misalnya, ketika terjadi proses pengusulan untuk penentuan anggota kabinet bahkan isu rencana *reshuffle* jilid satu dan jilid dua yang tidak dilaksanakan pun selalu menimbulkan kegaduhan politik dimana publik harus menyaksikan Presiden yang harus mempertimbangkan suara partai-partai politik yang mendukungnya. Benar bahwa kabinet dan *reshuffle* merupakan hak prerogatif presiden. Kadang presiden pun seakan tersandera oleh perilaku partai politik pendukungnya dan yang masuk menjadi koalisi berikutnya. Ketika Presiden sudah menentukan nama-nama yang akan masuk menjadi anggota kabinet, maka keputusan tersebut dianggap tidak dapat diganggu gugat. Penentuan posisi-posisi Menteri ini sangat dipengaruhi oleh koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo.³⁴ Menteri yang diangkat menjadi anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, mayoritas berasal dari partai politik. Sedangkan sebagian kecilnya adalah dari kalangan profesional. Partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo seperti PDIP, PKB, NasDem, Hanura, PPP, PAN, dan Golkar memiliki 'jatah kursi' dalam kabinet Presiden Jokowi. Namun tidak dengan partai oposisinya seperti Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mayoritas Menteri di dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi adalah anggota partai politik dan bukan kalangan profesional atau teknokrat, sehingga kualitas program dan performa kerjanya tidak dapat dipastikan. Setara Institute merilis peringkat kinerja Menteri dalam posisi 10 terbaik dan 10 terburuk. Berdasarkan kajian yang dilakukan Setara Institute, diketahui bahwa Menteri dengan kinerja terbaik adalah Mendagri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (berasal dari PDIP), Menaker Hanif Dakhiri dan Menteri Desa dan PDTT Marwan Ja'far (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan (Nasdem),

⁶ Suara Pembaharuan. *Kinerja Menteri Jeblok, Harus Segera Reshuffle Jilid II*. Edisi Kamis, 8 Oktober 2015. Ditemukan pada: <http://sp.beritasatu.com/home/kinerja-menteri-jeblok-harus-segera-reshuffle-jilid-ii/98246>. diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.59 WIB.

dan Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi (Hanura)⁷. Sedangkan 10 Menteri dengan kinerja terburuk adalah Menkum HAM Yasonna H Laoly (PDIP) dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo (Nasdem), Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menkes Nila F Moeloek, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.⁸ Namun faktanya Menteri dengan kinerja baik seperti Yudi Chrisnadi di-*reshuffle*, dan Menteri dengan kinerja buruk seperti Yasonna H. Laoly dan Rini M Soemarno tidak terkena *reshuffle*.

Terlebih kontroversi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang dinilai banyak pihak tidak memiliki kinerja yang baik, justru tidak pernah masuk di dalam daftar *reshuffle*. Hal ini menimbulkan kecurigaan banyak pihak bahwa Presiden tidak memiliki *nyali* untuk mengganggu gugat posisi Puan Maharani yang merupakan anak dari Ketua Umum PDI-P (partai pengusung Presiden). Kondisi ini menurunkan tingkat *trust* masyarakat kepada pemerintahan Jokowi.

Revolusi Mental yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi belum mampu dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan presiden dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang menunjukkan bahwa revolusi mental belum terlaksana dengan baik adalah masalah korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Terutama kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah-kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir tahun 2016 lalu, bahwa ada 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.⁹

Pemilukada serentak yang telah ditetapkan pada tahun 2014 dan telah berjalan pada tahun 2015 serta 2016 adalah salah satu upaya pemerintah untuk menekan permasalahan dan kegaduhan politik saat pra dan pasca pemilukada. Pemilukada serentak diharapkan dapat menekan anggaran yang dikeluarkan negara dan berusaha untuk menekan kesempatan *money politics*, konflik pasca pemilu, dan lain-lain. Akan tetapi faktanya, kepala daerah-kepala daerah yang terpilih melalui Pemilukada serentak masih terlibat kasus korupsi. Banyak peserta Pemilukada yang terpilih tidak memberikan garansi politik yang baik

⁷ Poskota News. *Susunan 10 Menteri Terbaik dan 10 Terburuk*. Edisi Senin, 16 November 2015. Ditemukan pada: <http://poskotanews.com/2015/11/16/susunan-10-menteri-terbaik-dan-10-terburuk/> diakses pada 14 Januari 2017 jam 13.56 WIB

⁸ *Ibid.*

⁹ *Harian Terbit. 361 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*. Edisi Jumat, 5 Agustus 2016. Ditemukan pada: <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/08/05/66825/25/25/361-Kepala-Daerah-Terjerat-Kasus-Korupsi>. Diakses pada: 14 Januari 2017 jam 15.47 WIB.

(*good politics*) dan juga *good governance* pada pemerintahannya. Pada Pemilihan serentak gelombang pertama, yakni daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya berakhir pada 2015 berjumlah 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota.¹⁰ Sedangkan pada Februari 2017 mendatang, akan ada 101 daerah yang melaksanakan pemilihan serentak, yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.¹¹

Permasalahan paling mencolok terjadi di era Presiden Jokowi adalah kasus dugaan adanya penistaan Agama yang melibatkan salah satu Cagub petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahjaja Purnama (Ahok). Kasus ini kemudian memunculkan gerakan Aksi Damai pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016 yang dikenal dengan Aksi Damai 411 dan 212. Umat Islam dari berbagai daerah dan dari berbagai organisasi turun ke jalan untuk mendesak pemerintah menindak tegas kasus dugaan penistaan Agama yang melibatkan Ahok tersebut.

Aksi Damai 411 dan 212 awalnya memberikan kesan yang baik kepada masyarakat bahwa aksi untuk mendesak pemerintah dapat dilakukan dengan damai. Akan tetapi, akhirnya aksi tersebut menimbulkan isu dan permasalahan yang lain, di antaranya adalah isu makar. Aksi Damai 411 dan 212 diisukan dari oknum-oknum yang ingin menguasai gedung MPR-DPR dengan memanfaatkan Aksi Damai 212. Ada beberapa tokoh yang kemudian diamankan oleh kepolisian atas dugaan kasus makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Rama Surungat, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungjas, Jamran dan Rizal Kobar.¹²

Bahkan Aksi Damai tersebut dijadikan momentum bagi kemunculan tokoh-tokoh muslim seperti Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Bachtiar Nasir, Riziq Riziq, hingga Aa Gym. Hal ini dikarenakan Aksi Damai berbeda jauh dengan aksi Reformasi 1998 karena tidak ada tokoh utama tunggal seperti Anien Ras-Bahkan, muncul isu bahwa FPI dan GNPF hendak mengusung Riziq Shihab sebagai imam besar di Indonesia dengan memanfaatkan momentum Aksi Damai tersebut. Umat Islam Indonesia berada dalam kondisi yang serba reaktif dan reaksioner atas keadaan yang terjadi. Hal seperti ini tentu saja tidak muncul tiba-tiba tetapi karena beberapa persolan yang muncul di Republik kita

10 DetikNews. Daftar Daerah yang Akan Laksanakan Pilkada Serentak 2015. Edisi Jumat 7 November 2014. Ditemukan pada: <http://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015> diakses pada 14 Januari 2017 jam 18:21 WIB.

11 Liputan 6. Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017. Edisi 15 Februari 2016. Ditemukan pada: <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017> diakses pada 14 Januari 2017 jam 18:24 WIB.

12 Liputan 6. Jerat Makar di Aksi Damai 212. Edisi 4 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://news.liputan6.com/read/2968730/jerat-makar-di-aksi-damai-212> diakses pada 14 Januari 2016 jam 17:38 WIB.

tercinta. Pembelahan umat Islam pun akhirnya terjadi dalam kutub yang bisa dikatakan sama-sama keras dan kuatnya. Bagaimana dengan Muhammadiyah?

Sikap Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah—sebagai sebagai salah satu organisasi Islam yang populer dan memiliki pengikut yang cukup banyak di Indonesia,¹³ menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak membutuhkan imam besar. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah tokoh-tokoh muslim yang dapat menunjukkan kesalehan politiknya dan menjadi representasi umat Islam dengan baik di kancah pemerintahan dan politik. Selama ini, ada stigma negatif yang dikarenakan oknum parpol dengan *background* Partai Islam seperti PKS dan PPP justru melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan tidak pantas lainnya. Sehingga tidak merepresentasikan umat Islam sebagaimana mestinya.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang memberikan kontrol pula terhadap pemerintahan, mempertanyakan sikap netral TNI-POLRI. TNI dan POLRI seakan-akan berusaha membendung massa dari berbagai daerah untuk mengikuti Aksi Damai 212 dengan melaksanakan istighosah di berbagai daerah. Kapolri bahkan mengeluarkan anjuran kepada masyarakat untuk tidak datang ke Jakarta dan mengadakan istighosah di daerahnya masing-masing¹⁴. TNI dan POLRI bahkan mengadakan istighosah di berbagai daerah seperti Sumenep, Kudus, dan lain-lain.

Pasca Aksi Damai 411 dan 212, ternyata menyisakan manifest kapitalisasi yang mungkin tidak diharapkan oleh sebagian besar umat Islam yang mengikutinya. *Branding* 212 kemudian dijadikan nama Koperasi Syariah hingga Minimarket. Roti Maida, sebagai tandingan Sari Roti, serta gerakan Subuh Berjamah, Tabligh Akbar. Spirit aksi damai 212 digelorakan oleh sebagian umat Islam yang turut serta, atau sekedar menjadi simpatisan aksi tersebut. Momentum dan peristiwa yang menarik perhatian banyak pihak membuat sebagian orang memanfaatkan nama 212. Koperasi Syariah 212 digagas oleh Eka Gumilar dan menasar bidang ritel dan properti di tahun-tahun pertamanya.¹⁵ Meskipun mengusung bentuk

¹³ Saiful Mujani, *Islam Moderat*, Gramedia Jakarta 2010. Warga Muhammadiyah mencapai 25 juta. Terdiri dari Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting sebesar 2,5 % (2.500. orang), sementara warga Muhammadiyah mencapai 22,5 % adalah warga Muhammadiyah.

¹⁴ Arah.com. *Panglima TNI Sarankan Demo 212 di Daerah Masing-masing*. Edisi Selasa, 29 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.arah.com/article/16855/panglima-tri-sarankan-demo-212-di-daerah-masing-masing.html>. diakses pada: 14 Januari 2017 jam 20.20 WIB.

¹⁵ Tribun Pangan. *Koperasi Syariah Bidik Sektor Ritel dan Properti*. Edisi 18 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://www.tribunpangan.com/2016/12/koperasi-syariah-212-bidik-sektor-ritel.html> diakses pada: 14 Januari 2017 jam 20.58 WIB.

koperasi, tetapi unsur '212' disini tetaplah mengambil momentum pasca Aksi Damai 212. Sedangkan dalam waktu dekat pasca Aksi Damai, akan didirikan pula Minimarket Muslim 212, yang diprakarsai oleh Bunda Ratu, Dr. Taufan dan Agung Mozin.¹⁶ Aksi Damai 212 yang bertujuan untuk membela Agama Islam atas kasus penistaan Surat Al Maidah oleh Basuki Tjahja Purnama, justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk memperoleh *branding* usaha.

Muhammadiyah, sebagai organisasi sosial keagamaan yang modern, dalam kaitannya dengan Aksi Damai 411 dan 212 telah mengeluarkan surat edaran dari PP Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah lebih baik mengurus masalah lain yang jauh lebih besar, ketimbang energinya habis untuk mengurus Aksi. Tetapi himbauan yang dilakukan PP Muhammadiyah agaknya tidak ditanggapi secara maksimal oleh para pimpinan di level Wilayah (Provinsi), daerah (Kabupaten) maupun Cabang (Kecamatan), sehingga beberapa dari mereka mengikuti dengan semangat bersama pimpinan dan anggota lainnya untuk Aksi di Jakarta. Hal ini dilakukan oleh para pimpinan di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Denpasar Bali. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa Aksi 411 dan 212 merupakan Aksi untuk Bela Islam di Indonesia. Oleh karena ada tertulis "Bela Islam" maka warga Muhammadiyah mengikutinya dengan semangat, bahkan sebagian menganggap sebagai jihad.

Muhammadiyah tidak secara resmi mendukung Aksi Damai 411 dan 212 tersebut. Tetapi para aktivis Muhammadiyah dari berbagai daerah tampak hadir di sana dan mendukung. Sikap tidak mendukung tetapi juga tidak melarang sebenarnya disayangkan oleh warga Muhammadiyah, sebab Pemuda Muhammadiyah melalui ketuanya turut ambil bagian dari Aksi damai tersebut. Demikian pula Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali.

Pembagian Peran-Peran Politik Kekuasaan

Kepemimpinan Muhammadiyah menjadi sentral dalam menentukan peran yang dijalankan oleh Muhammadiyah dari masa ke masa. Pada masa Pemerintahan Jokowi ini, semakin terlihat bahwa perlu ada alternatif pemikiran dan aspirasi politik umat yang dapat diakomodasi dalam keseimbangan kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam pemerintahan saat ini.

¹⁶ TrenIndonesia News. *Minimarket Muslim 212 Maret Akan Segera Dibangun Di Jabodetabek*. Edisi 16 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://trenindonesia.news/index.php/2016/12/16/minimarket-muslim-212-maret-akan-segera-dibangun-di-jabodetabek/> diakses pada 14 Januari 2017 jam 21.11 WIB.

Jika memperhatikan peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis-*low politics*) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Muhammadiyah agaknya dalam kegiatannya lebih secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaan (*power struggle*) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara.¹⁷

Kepemimpinan Muhammadiyah perlu merespon persoalan bangsa di seluruh aspek, baik pada tataran *real politics* maupun *high politics*. Muhammadiyah perlu memunculkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang *capable*. Terlebih dalam situasi saat ini, Muhammadiyah memiliki posisi untuk menyatukan umat Islam melalui tokoh-tokoh pimpinan Muhammadiyah baik yang berada pada tingkat pusat maupun wilayah.

Terkait kondisi bangsa saat ini, banyak tokoh di luar Muhammadiyah yang muncul dan berusaha menarik simpati massa. Ini menjadi politik *counter productive* bagi Muhammadiyah. Ormas FPI dan GNPF MUI saat ini terlihat

¹⁷ Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara <http://batang.muhammadiyah.or.id/content-79-sdet-khittah-perjuangan-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara.html>

mendominasi pergerakan massa terkait kasus penistaan agama. Dalam hal ini dari wawancara dengan PWM Jawa Barat dijelaskan bahwa Muhammadiyah masih kurang solid dalam berpolitik dan merespons sikap Umat Islam yang terkait dengan kondisi riil politik keumatan di Indonesia. Hasil wawancara dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat di bawah ini bisa menjelaskan kondisi tersebut. Di mana posisi politik Muhammadiyah dilihat sebagai aktivitas yang problematik, tidak alokatif ataupun suportif.

“Kepemimpinan Muhammadiyah saat ini perlu menata manajemen penokohan agar muncul di pentas nasional dalam rangka memunculkan kader-kader Muhammadiyah. Kemunculan tokoh-tokoh ini akan memantapkan Ghiroh Keislaman bagi umat Islam. Dari sana Muhammadiyah dapat muncul sebagai leader dalam panggung nasional, bukan FPI”. Bila FPI yang di depan menjadi pemimpin, pertanggungjawaban tidak jelas dan juga pertanggungjawaban kemana itu tidak diketahui. Dengan Gerakan Subuh Berjamaah dan Koperasi Syariah 212, yang sudah ada saat ini walaupun digerakkan oleh GNPF MUI, namun Muhammadiyah dapat mengambil energi positifnya dari Umat Islam untuk diarahkan menuju dakwah perjuangan Muhammadiyah dalam kerangka merespon kondisi kebangsaan saat ini”.

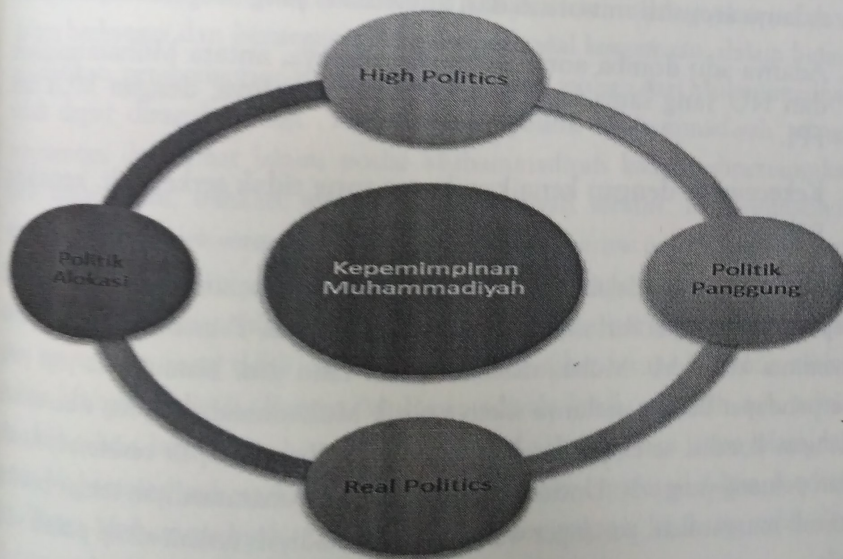
Bahkan, lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, mereka menyatakan bahwa sebenarnya para kader mengharapkan sikap politik yang jelas dari Muhammadiyah. Mereka juga menekankan bahwa Muhammadiyah yang ikut aksi tidak menokohkan Rizieq Shihab, pemimpin FPI. Namun Muhammadiyah melakukan aksi 212 tersendiri tidak bergabung dengan massa FPI. Aksi 212 merupakan momentum Muhammadiyah untuk merumuskan ulang sikap politik Muhammadiyah. Kelambanan respon Muhammadiyah terhadap kasus dugaan penistaan agama, diambil sebagai peluang bagi ormas lain. Ini memunculkan apa yang disebut sebagai Politik Panggung, banyak ormas, bahkan seakan-akan semua ormas mencari panggung untuk dapat dilihat di pentas nasional. Namun demikian, Muhammadiyah dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai peluang kebangkitan Umat Islam. Muhammadiyah yang terkesan lambat dalam mengambil momentum atas berbagai peristiwa politik nasional, seperti kasus di Jakarta secara tidak langsung memberikan peluang pada ormas Islam seperti FUI, MUI, GNPF dan lainnya untuk menjadi pemimpin umat Islam, sekalipun massanya sedikit. Muhammadiyah tentu tidak berharap Rizieq Shihab menjadi

pemimpin utama Umat Islam, apalagi sebagai Imam Besar umat Islam, tetapi jika Muhammadiyah tidak ambil inisiatif untuk ambil bagian dari gerakan politik nasional maka yang akan terjadi adalah Rizieq Shihab bersama FPI menjadi tokohnya.

Berdasarkan analisis di atas, sikap elit Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Muhammadiyah dapat dijelaskan dalam beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian Muhammadiyah di tingkat Pusat, yakni sebagai berikut:

1. Muhammadiyah perlu menempatkan kader secara tepat dan yang mempunyai kompetensi dalam organisasi.
2. Perlu merumuskan ulang sikap politik, ekonomi, hukum, agama, pendidikan Muhammadiyah.

Ini dapat disebut sebagai "politik alokasi" kekuasaan. Dengan demikian perlunya perubahan sikap politik Muhammadiyah (dari politik netral ke politik alokatif dan advokatif/responsif) baik dalam tataran *real politics* maupun *high politics*. Muhammadiyah harus ambil bagian dalam "politik alokatif" yaitu dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan catatan pendidikan politik harus jalan.



Gambar : Kerangka Politik Muhammadiyah di Jawa Barat

Temuan lapangan terkait politik alokasi kekuasaan juga terdapat gambaran yang jelas dari PWM Bali. Adanya perbedaan persepsi di kalangan Muhammadiyah di level wilayah, khususnya di Provinsi Bali terkait Pernyataan Pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Rencana Aksi 4 November 2016, Nomor :

552/PER/1.0/A/2016, membuat kurang utuhnya persepsi di antara warga Muhammadiyah di Bali. Pernyataan Pers Muhammadiyah ini menimbulkan 2 pertanyaan mendasar bagi para pengikut Muhammadiyah yaitu pertama, terkait seperti apa formula politik Muhammadiyah, dan posisi Muhammadiyah dalam menyikapi kondisi politik di akhir 2016. Muhammadiyah dianggap kurang tegas dalam sikap politik. Yang terjadi adalah ketidakjelasan. Sehingga, ketika FPI naik panggung, gaungnya terasa secara nasional. Bahkan, Rizieq Rizieq ditokohkan oleh sebagian besar umat Islam termasuk di dalamnya sebagian warga Muhammadiyah di Bali. Rizieq Shihab dianggap bukan hanya pimpinan FPI, tapi sebagai Imam Besar pemimpin umat Islam Indonesia. Persepsi ini dilatarbelakangi oleh persepsi masyarakat terhadap beberapa hal yang terkait kondisi nasional yang dihadapi masyarakat saat ini, di antaranya:

1. Hubungan Pemerintah yang terlalu dekat dengan Cina. Banyaknya investasi dari Cina dan berita tentang TKA Cina.
2. Kedekatan Pemerintah dengan Syiah, dalam hal ini dengan Iran. Sementara tidak ada simpati terhadap derita muslim Rohingya, juga ketika Aleppo yang di bom.
3. Adanya arogansi minoritas dan kekuasaan yang arogan.
4. Adanya adu domba antar umat. Khususnya, antara Muhammadiyah dan NU yang sama-sama besar jumlah umatnya, dengan MUI dan FPI.
5. Kekecewaan dengan kenaikan harga yang tidak terkendali, kenaikan pajak.

Temuan yang lain adalah adanya harapan agar Muhammadiyah memperbaiki kepemimpinannya. Perlunya sikap yang tegas pada Pemerintah, tidak perlu meminta kursi dsb. Muhammadiyah perlu tahu diri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perlunya sikap politik Muhammadiyah yang disesuaikan dengan kondisi setempat, melihat aspek mudharat, aspek resistensi, siasah, dan peluang yang ada. Untuk itu peran LHKP Muhammadiyah sangat penting untuk menyatukan pendapat warga Muhammadiyah terkait sikap politik yang ada.



Gambar : Kerangka Politik Muhammadiyah di Jawa Barat

Positioning Kepemimpinan Umat

Sebagai organisasi Islam yang besar, Muhammadiyah tentu diharapkan perannya dalam berbangsa dan bernegara. Peran-peran sosial keagamaan, dalam bidang pendidikan, pembangunan rumah sakit dan panti asuhan dari Muhammadiyah tidak dapat diragukan lagi. Tetapi, peran politik Muhammadiyah sebagai representasi dari umat Islam, posisi Muhammadiyah kadang dipertanyakan oleh umat Islam, bahkan warga Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah seringkali dilihat oleh warganya kurang hadir dalam pentas politik nasional yang sedang bergejolak. Muhammadiyah terlihat kurang cepat dalam memberikan respon masalah umat Islam yang muncul. Bisa saja warga Muhammadiyah atau umat Islam yang tidak memahami atau melihat secara langsung aktivis politik Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih memilih *soft politics* atau *high politics* ketimbang *low politics* atau *hard politics*, tetapi umat Islam dan warga Muhammadiyah agaknya berharap lain pada organisasi Islam modern ini. Warga Muhammadiyah dan umat Islam tampaknya lebih memilih jika Muhammadiyah terlibat aktif berpolitik.

Dalam merespon persoalan bangsa Indonesia, secara organisasional jika Muhammadiyah tidak muncul, maka umat kurang mengetahui bagaimana arah perjuangan politik Muhammadiyah. Muhammadiyah perlu untuk memimpin umat Islam yang jumlahnya sangat besar di Indonesia, mencapai tidak kurang dari 150 juta penduduk Indonesia (88,4 %) dari 254 juta total

penduduk Indonesia.¹⁸ Selain itu, Muhammadiyah juga perlu memperkuat jaringan dengan ormas Islam yang lain, yang sejalan dengan Muhammadiyah. Dalam situasi saat ini, perlu ada *mainstreaming* kepemimpinan Muhammadiyah terhadap umat Islam secara luas, tidak melawan arus, namun tetap memiliki sikap politik yang jelas dan juga tidak diatur oleh ormas lain.

Saat ini, masyarakat sudah berkurang kepercayaannya terhadap partai politik karena kiprah partai politik yang dekat dengan korupsi dan *money politics*. Momentum ini perlu diambil Muhammadiyah dan bisa bersinergi dengan NU untuk menguatkan sikap politik. Dengan demikian politik netral bukan lagi menjadi pilihan umat. Peluang bisa muncul dari Muhammadiyah. Muhammadiyah harus mengubah sikap politiknya. Muhammadiyah harus memiliki kader yang bisa melakukan manuver politik. Untuk itu tidak harus ketua umum yang melakukan, namun kader-kader yang mempunyai kapasitas.

Dalam temuan lapangan diketahui pula bahwa Muhammadiyah sikap politiknya harus tegas karena ada kekhawatiran, ketika Muhammadiyah tidak muncul, peluang akan diambil oleh ormas lain. Muhammadiyah harus memilih kadernya, untuk tampil ke depan. Ketika kader Muhammadiyah sudah aktif dalam politik, politik netralnya tidak perlu digunakan lagi. Politik itu memihak dan memilih karena itu penuh dengan resiko. Tetapi Muhammadiyah harus berpolitik yang resikonya lebih sedikit ketimbang resikonya lebih banyak menyusahkan Muhammadiyah.

Persoalan kepemimpinan nasional atau pimpinan daerah harus dirumuskan tentang *fiqh siyasah* karena semuanya terkait dengan kondisi lokal yang *ijtihadiah*. Misalnya di Denpasar Bali, maka Muhammadiyah tidak bisa menentukan pilihannya berdasarkan identitas keagamaan, karena semuanya beragama Hindu, lalu apakah Muhammadiyah tidak perlu terlibat dalam politik? Tidak bisa demikian karena politik itu memang mengandung resiko dan mengambil resiko itulah yang harus dilakukan Muhammadiyah.

Perkembangan politik selama Pemilu 1999-2014 memperlihatkan hubungan Muhammadiyah dan perpolitikan nasional bersinggungan dengan keberadaan PAN. Para kader-kader dan warga Muhammadiyah memiliki pilihan bebas mendukung partai politik selain PAN yang memiliki kursi di parlemen. Tetapi relasi kuasa eksekutif negeri ini hingga 2014 hanya memungkinkan masuknya tokoh-tokoh Muhammadiyah melalui PAN. Sebagai relasi antara Muhammadiyah dan perpolitikan nasional membutuhkan PAN sebagai

¹⁸ BPS tahun 2015, seperti dilaporkan oleh *Harian Kompas, Penduduk Indonesia*. 15 Juli 2015

jembatan. Sebenarnya inilah kenyataan yang tak tidak bisa di bantah selama kurun waktu 2009-2014. Aspirasi warga Muhammadiyah dalam bidang politik tidak dapat mengelak dari keberadaan PAN.¹⁹

Memperhatikan konstelasi politik nasional maupun politik lokal yang demikian tinggi tensinya, terutama menjelang Pemilu Legislatif juga Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah) di seluruh Indonesia, para politisi Muhammadiyah, terutama yang berada di PAN, membutuhkan kejelasan sikap politik Muhammadiyah. Muhammadiyah sulit berharap agar para politisinya masuk di dalam parlemen jika secara kelembagaan melarang untuk berpolitik praktis. Surat Keputusan PP Muhammadiyah (159) tahun 2009, tentang sikap politik Muhammadiyah yang netral, tidak mendukung salah satu kadernya untuk berpolitik praktis, menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik serta melarang pimpinan atau pengurus harian duduk dalam partai politik praktis dianggap sebagai sikap politik Muhammadiyah yang tidak bisa diterima dengan sepenuh hati oleh para politisi Muhammadiyah.

Para politisi Muhammadiyah berharap tidak ada larangan untuk berpolitik praktis dari para warga Muhammadiyah, termasuk yang menjadi pimpinan. Hal ini disebabkan di daerah mencari politisi dari Muhammadiyah itu sulit. Jika menjadi pimpinan di daerah (baik Wilayah ataupun daerah) kemudian dilarang berpolitik maka bisa dibayangkan bahwa tidak ada aktivis Muhammadiyah yang bersedia menjadi politisi atau menjadi aktivis Muhammadiyah karena adanya larangan berpolitik. Padahal Muhammadiyah sendiri menghendaki adanya keterlibatan warganya dalam politik, sementara pimpinannya tidak diperbolehkan dalam politik. Seharusnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan kebebasan pada aktivisnya untuk berpolitik, sebab nanti akan lebih mudah berkomunikasi politik dengan politisi Muhammadiyah dalam parlemen jika terpilih.

Gagasan semacam itu muncul dari para pimpinan Muhammadiyah di tingkat wilayah dan daerah yang selama ini mendapatkan keberkahan dari adanya politisi Muhammadiyah yang ada dalam parlemen. Namun jika tidak ada aktivis Muhammadiyah di parlemen, maka keberkahan yang di dapatkan dari politisi untuk Muhammadiyah demikian sulitnya. Pertanyaannya, apakah berarti Muhammadiyah harus membolehkan atau memberikan kesempatan pada aktivisnya sekalipun pimpinan untuk menjadi politisi? Jika demikian apakah tidak akan merepotkan Muhammadiyah di tingkat daerah atau pun wilayah

¹⁹ Rosyida Prihandini. Relasi Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah di dalam struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 357-368, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmf08cc6c1f8full.pdf>

jika nanti demikian banyaknya aktivis Muhammadiyah, terutama pimpinan menjadi politisi? Tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari para pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah dan daerah di seluruh Indonesia.

Model berpolitik Muhammadiyah dengan menjaga jarak dengan semua partai politik, serta tidak secara tegas memberikan dukungan politik pada salah satu kandidat presiden membuat posisi politik Muhammadiyah dikatakan sebagai model berpolitik yang tidak berani menanggung resiko. Pilihan politik netral tentu saja akan berdampak pada adanya sikap politik pemenang pemilu. Presiden akan berhitung secara matang untuk melibatkan kadernya dalam kabinet. Inilah resiko politik Muhammadiyah.

Gagasan adanya "Amal Usaha Politik" Muhammadiyah agaknya perlu mendapatkan perhatian serius dari PP Muhammadiyah.²⁰ Sebenarnya gagasan mantan Ketua Umum Din Syamsuddin yang menyatakan bahwa aktivis atau warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk berpolitik praktis, termasuk masuk menjadi anggota partai dan menjadi anggota parlemen, merupakan gagasan yang cukup positif. Hanya saja pemahaman tentang pernyataan mantan ketua umum sering dipahami sebagai adanya kebebasan untuk menjadi politisi PAN, bukan diluar PAN. Bahkan yang paling konyol lagi adalah adanya anggapan bahwa aktivis Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis secara keseluruhan. Padahal jika kita tidak salah memahami maka yang dimaksudkan adalah untuk para Pengurus Harian, jika hendak berpolitik praktis menjadi anggota parlemen, menjadi pengurus partai, maka sebagai pengurus harian seharusnya mengundurkan diri agar dapat maksimal dalam berpolitik. Tetapi jika hanya sebagai anggota partai, anggota Muhammadiyah, maka silahkan pula tetap berpolitik. Berpolitiknya pun tidak hanya di PAN, semua partai politik yang diminati. Inilah sebenarnya politik alokatif yang Din Syamsuddin gagas sepuluh tahun yang lalu, bahkan sebelum menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Para politisi Muhammadiyah berharap kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Pendidikan politik akan diperbanyak; (2) Mendorong anak muda untuk aktif dalam KPU, partai dan seterusnya; (3) Politik Alokatif masih diperlukan (4) Muhammadiyah harus aktif dalam bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Agama dan Pendidikan.

²⁰ Bahtiar Effendy, *Amal Usaha Politik Muhammadiyah*, dkk, dalam Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, M Nurul Yamin (ed), *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Pustaka Pelajar Pascasarjana UMY, 2015.

Rejuvenasi Politik Islam?

Peristiwa yang terjadi pada Aksi Bela Islam 401 dan 202 menyisakan banyak pertanyaan, salah satu pertanyaan penting untuk umat Islam dan Muhammadiyah, benarkah sedang terjadi rejuvenasi politik umat Islam? Benarkah tengah terjadi perubahan pendulum politik umat Islam dari politik tinggi (*high politics*) yang dibawa oleh Muhammadiyah menuju politik rendah (*low politics*) atau *real politics* di bawah ormas Islam lain seperti FPJ-MUI-GNUF dan sejenisnya?

Kita dapat menengok kejadian politik Indonesia pada tahun 1980-an misalnya. Sejak tahun 1964-85 pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menerangkan kebijakan asas tunggal partai politik dan ormas keagamaan (Islam) untuk menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Organisasi sosial politik dan keagamaan, atau ormas apapun yang tidak berasaskan Pancasila maka ditutup dengan tidak hormat atau disebut dengan ungkapan subversif, dengan makna sangat pejoratif yakni melawan negara dengan tidak mengindahkan perintah negara Islam asas tunggal berhalangan dan bertentangan. Muhammadiyah dan NU pun menggunakan asas Pancasila sebagai asas organisasi, sekalipun tetap berakidah Islam sebagai landasan teologisnya. Tokoh Muhammadiyah kultural, KH H. Fachrudin, mengistilahkan penggunaan asas tunggal Pancasila bagi Muhammadiyah itu ibarat mengendarai sepeda motor di jalur helm, maka kita menggunakan helm, tuh kepala tetap ada sekalipun ditutupi dengan helm. Jelas ini dan penggunaan asas tunggal Pancasila membuat Muhammadiyah tidak menjadi musuh negara yang ketika itu sangat otoriter dan represif.

Sebagai gerakan kultural bernama NU, Muhammadiyah mengemalkan pendidikan, rumah sakit, panti asuhan dan berbagai gerakan ekonomi lainnya. Selain itu pembinaan keislaman dikalangan masyarakat, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama jumlah masjid yang dibangun mencapai ratusan bahkan ribuan jumlahnya. Demikian pula meningkatnya jumlah arjana muslim. Kondisi semacam ini oleh Robert Hefner disebut sebagai *boom* yang baru di kalangan muslim kelas menengah. Jumlah mahasiswa IAIN tahun 1990, meningkat 4 kali lipat dari tahun 1979 yang hanya 26.300 seluruh Indonesia menjadi 100.000. di 14 IAIN tahun 1991, jumlah mahasiswa dari NU mencapai 14 % total alumni SMLI. Demikian pula masjid, khususnya di Jawa Timur, meningkat dari tahun 1973 hanya 15. 574. Tahun 1979 menjadi 2.750 buah. Tahun 1984 menjadi 20.648 buah. Pada tahun 1990 meningkat

menjadi 25.655 buah.²¹ Sementara itu, masjid milik Muhammadiyah saja mencapai 6.118. Sementara itu pondok pesantren NU sampai tahun 2014 mencapai 30.0000. Dimana setiap tahun bertambah 100 buah di seluruh Indonesia.²²

Kemajuan di bidang kebudayaan, seperti disebutkan di atas, ternyata tidak semeriah dalam bidang politik. Politik umat Islam mengalami keterpurukan sepanjang sejarahnya. Hanya tahun 1955 partai Islam yang diwakili Masyumi dan NU mendapatkan suara yang sangat signifikan dengan jumlah suara umat Islam. Umat Islam mendapatkan ruang politik yang sangat luas ketika itu. Tetapi sejak Orde Baru menjadi penguasa kondisi politik umat Islam tidak sebagaimana diharapkan, bahkan sebagian pengamat mengatakan mengalami peminggiran politik Islam, dan peminggiran peran politiknya di ruang publik.²³

Sekalipun pada tahun 1990-an sebenarnya umat Islam mendapatkan ruang politik yang sangat luas di bawah Soeharto dengan dibentuknya berbagai fasilitas untuk umat Islam, seperti Bank Muamalat tahun 1989, disahkannya UUPA, dibolehkannya jilbab dipakai di sekolah negeri dan kantor-kantor pemerintah, pengajian di kantor-kantor pemerintah, ICMI dibentuk tahun 1990 akhir (Desember 1990), serta berangkatnya keluarga Soeharto ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji secara bersama-sama. Bahtiar Effendi menyebut fenomena ini sebagai keberhasilan politik akomodatif yang dimainkan umat Islam. Umat Islam tidak hanya memerankan politik konfrontatif dan politik kekerasan terhadap pemerintah. Pemerintah merubah sikap politiknya karena memperhatikan perilaku politik umat Islam berubah menjadi akomodatif, selain juga tidak konfrontatif dengan kebijakan pemerintah.²⁴

Jika pada awal tahun 1990-an, kita mengenal istilah politik aliran, dengan munculnya kelompok-kelompok politik keagamaan seperti ICMI, dan tentu saja partai Islam seperti PPP, yang sudah ada sejak tahun 1970-an, serta partai seperti PKS, PBB, Masyumi, PSII, Partai Umat Islam, dan sebagainya maka benarkah saat ini tengah terjadi pergeseran pendulum politik dari politik aliran menjadi non aliran? Selain itu benarkah tengah terjadi pergeseran kiblat politik dari Muhammadiyah dan NU menjadi Islam *non-mainstream* seperti FPI dan

21 Robert W Hefner, *Civil Islam: Islam and Democratization in Indonesia*, Princeton University, 2000. Hal. 114

22 Zamahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Pola pendidikan dan kehidupan kiai*, edisi revisi 2015

23 M. Rusli Karim, *Peminggiran Politik Umat Islam*, Tiara Wacana, 2009

24 Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Paramadina, 1998

HTI? Jika hal ini benar dimanakah sebenarnya peran politik Muhammadiyah di Indonesia yang membawa bendera Islam *rahmatan lil alamin* dengan memainkan peran politik tinggi berada?

Pada umumnya, sejak tahun 1990-an, memang ada perubahan sikap politik rezim kepada umat Islam yang sebelumnya sangat represif seperti telah penulis singgung di atas. Negara memang menerapkan asas tunggal pada tahun 1984-85, tetapi ini dianggap sebagai konsensus bersama umat Islam Indonesia. Muhammadiyah dan NU pun menerimanya. Bahkan sejak tahun 1990-an umat Islam yang semula berada di bawah “ketiak Orde Baru” diberi peran masuk ke birokrasi, TNI dan Polri, bahkan perbankan. Ini merupakan gejala perubahan yang sangat penting di Indonesia sebab setelah sekian lama ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan, umat Islam senantiasa seperti kucing kurap—meminjam istilah Mohammad Natsir Mantan Perdana Menteri era Orde Lama Soekarno serta mantan Ketua Masyumi dan Dewan Dakwah Islamiyah.²⁵

Jika memperhatikan peristiwa politik nasional pada Aksi Bela Islam 411 dan 212 tahun 2016 yang lalu, dengan tampilnya banyak tokoh Islam yang dahulu tidak muncul, serta kelompok-kelompok Islam yang dapat dikatakan relatif baru, yakni pasca 1998 (pasca reformasi) politik Indonesia, inikah politik Islam mengalami perubahan secara substansial? Benarkah tengah terjadi perubahan dari politik Islam yang menjunjung tinggi martabat keragaman, kesetaraan, keragaman, serta moderatisme Islam menjadi yang lain, yakni lebih radikal, fundamentalis atau artifisial di politik Islam Indonesia?

Penutup

Dengan uraian yang telah saya kemukakan di seluruh tulisan ini, sebenarnya Muhammadiyah tetap akan menjadi bagian penting dari politik Indonesia, asalkan mampu memainkan perannya secara strategis dan responsif atas masalah umat yang muncul di Indonesia. Banyak orang tetap berharap pada Muhammadiyah untuk tetap menjadi *leader* dalam politik dan aktivitas kebudayaan umat Islam, bukan kelompok lainnya seperti FPI, GNPF MUI, HTI atau pun MMI.

Umat seakan mendapatkan pemimpin baru Islam, Rizieq Shihab karena Muhammadiyah dan NU dalam kasus dugaan penodaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) lambat dalam merespons. Muhammadiyah

²⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999. hlm. 137-139

kurang dapat mengambil momentum kepemimpinan umat sehingga umat Islam seakan pindah ke pemimpin lainnya. Oleh sebab itu, sebagaimana dikemukakan dalam tulisan ini, Muhammadiyah perlu melakukan redefinisi peran politiknya di masa depan dan perlu responsif atas persoalan bangsa, sehingga tidak ditinggalkan umat atau umat berpaling pada kelompok lainnya.

Adanya banyak aktor dalam kegiatan politik praktis seperti Aksi bela Islam di Jakarta memperlihatkan sebenarnya umat Islam membutuhkan panggung untuk menyalurkan aspirasi politiknya yang selama ini dirasakan terpendam. Umat Islam membutuhkan kejelasan arah politik Indonesia, sehingga bangsa ini segera keluar dari krisis kepemimpinan. Sebab, seperti kita ketahui, sebagian umat Islam beranggapan bahwa kepemimpinan Jokowi dan Muhammadiyah sangat lemah, kurang berwibawa dan memiliki kekuatan sebagai penyeimbang dengan kekuatan politik negara-negara lain. Muhammadiyah sebagai ormas Islam harus bisa hadir di tengah problem umat.



Daftar Pustaka

- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Paramadina, 1999
- Effendy, Bahtiar, Amal Usaha Politik Muhammadiyah, dkk, dalam Zuly Qodir, Achmad Nurmandi, M Nurul Yamin (ed), *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik sebagai Amal Usaha*, Pustaka Pelajar Pascasarjana UMY, 2015.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999
- Hadiz, Vedi R. *Populisme Islam in Indonesia and the Middle East*, ISEAS, Singapore, 2015
- Hefner, Robert, W. *Civil Islam: Islam and Democratization in Indonesia*, Princeton University, 2000.
- Karim, M. Rusli. *Peminggiran Politik Umat Islam*, Tiara Wacana, 2000
- Rosyida Prihandini. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 357-368, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmf08cc6c1f8full.pdf>, Relasi Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah di dalam Struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015.
- Arah.com. *Panglima TNI Sarankan Demo 212 di Daerah Masing-masing*. Edisi Selasa, 29 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.arah.com/article/16855/panglima-tni-sarankan-demo-212-di-daerah-masing-masing.html>. diakses pada: 14 Januari 2017 jam 20.20 WIB.

- DetikNews. *Daftar Daerah yang Akan Laksanakan Pilkada Serentak 2015*. Edisi Jumat 7 November 2014. Ditemukan pada: <http://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015> diakses pada 14 Januari 2017 jam 16.21 WIB.
- Harian Terbit. *361 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi*. Edisi Jumat, 5 Agustus 2016. Ditemukan pada: <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/08/05/66825/25/25/361-Kepala-Daerah-Terjerat-Kasus-Korupsi>. Diakses pada: 14 Januari 2017 jam 15.47 WIB.
- Kabar Pergerakan.com. *Survei: 78.9% Publik Kecewa Dengan Kinerja Jokowi-JK*. Edisi Selasa, 10 November 2016. Ditemukan pada: <http://www.kabarpergerakan.com/pergerakan/survei-789-persen-publik-kecewa-dengan-kinerja-jokowi-jk/>. Diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.21 WIB.
- Liputan 6. *Ini 101 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2017*. Edisi 15 Februari 2016. Ditemukan pada: <http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>. diakses pada 14 Januari 2017 jam 16.24 WIB.
- Liputan 6. *Jerat Makar di Aksi Damai 212*. Edisi 4 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://news.liputan6.com/read/2668730/jerat-makar-di-aksi-damai-212>. diakses pada: 14 Januari 2016 jam 17.36 WIB
- Poskota News. *Susunan 10 Menteri Terbaik dan 10 Terburuk*. Edisi Senin, 16 November 2015. Ditemukan pada: <http://poskotanews.com/2015/11/16/susunan-10-menteri-terbaik-dan-10-terburuk/> diakses pada 14 Januari 2017 jam 13.56 WIB
- Suara Pembaharuan. *Kinerja Menteri Jeblok, Harus Segera Reshuffle Jilid II*. Edisi Kamis, 8 Oktober 2015. Ditemukan pada: <http://sp.beritasatu.com/home/kinerja-menteri-jeblok-harus-segera-reshuffle-jilid-ii/98246>. diakses pada 14 Januari 2017 jam 10.59 WIB.
- Tribun Pangan. *Koperasi Syariah Bidik Sektor Ritel dan Properti*. Edisi 18 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://www.tribunpangan.com/2016/12/koperasi-syariah-212-bidik-sektor-ritel.html> diakses pada: 14 Januari 2017 jam 20.58 WIB.
- TrenIndonesia News. *Minimarket Muslim 212 Maret Akan Segera Dibangun Di Jabodetabek*. Edisi 16 Desember 2016. Ditemukan pada: <http://trenindonesia.news/index.php/2016/12/16/minimarket-muslim-212-maret-akan-segera-dibangun-di-jabodetabek/> diakses pada 14 Januari 2017 jam 21.11 WIB.